

BAB I PENDAHULUAN

I.1 KONDISI UMUM ORGANISASI

Bagian Hukum dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala BSN Nomor 965/BSN-I/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional. Bagian Hukum pada Biro HOH merupakan unsur penunjang Badan Standardisasi Nasional yang berkedudukan dibawah koordinasi Sekretaris Utama. Bagian Hukum mempunyai peran strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN dalam menyediakan peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian serta pelaksanaan bantuan dan penyuluhan hukum.

Berdasarkan Pasal 25 Keputusan tersebut, Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penelaahan hukum, perumusan dan penyusunan peraturan perundangan, pemberian bantuan dan penyuluhan hukum.

LAKIP Bagian Hukum Tahun 2018 merupakan bentuk dokumen pertanggungjawaban berdasarkan pada Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP Bagian Hukum ini disusun dengan memperhatikan berbagai kondisi dan permasalahan yang dihadapi. Permasalahan yang timbul dan mungkin akan timbul (deteksi dini) yang menyangkut kondisi internal dan eksternal baik regional, nasional, maupun Internasional.

Selanjutnya, dengan tersusunnya LAKIP Bagian Hukum diharapkan dapat :

1. meningkatkan kualitas Akuntabilitas Kinerja Bagian Hukum;
2. meningkatkan komitmen dan kerjasama baik dengan unit eselon III lingkup kesestamaan maupun seluruh unit kerja yang ada dilingkungan BSN. Sehingga kerjasama dengan manajemen kinerja berjalan seperti yang

diharapkan, mencakup perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja hingga evaluasi kinerja;

3. menyelenggarakan tugas pemerintahan dengan baik dan benar serta transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan masyarakat.

A. KELEMBAGAAN

Kelembagaan menjadi faktor penentu dalam mencapai keberhasilan kinerja Bagian Hukum. Kelembagaan menyangkut aspek tugas pokok, fungsi, struktur organisasi, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana.

A.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bagian

Dalam hal ini, tugas pokok dan fungsi, serta organisasi Bagian Hukum Biro HOH BSN adalah sebagai berikut.

a. Tugas Pokok dan Fungsi

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, analisis, pengkajian, penelaahan peraturan perundang-undangan, urusan dokumentasi dan pemberian informasi hukum serta bantuan dan penyuluhan hukum.

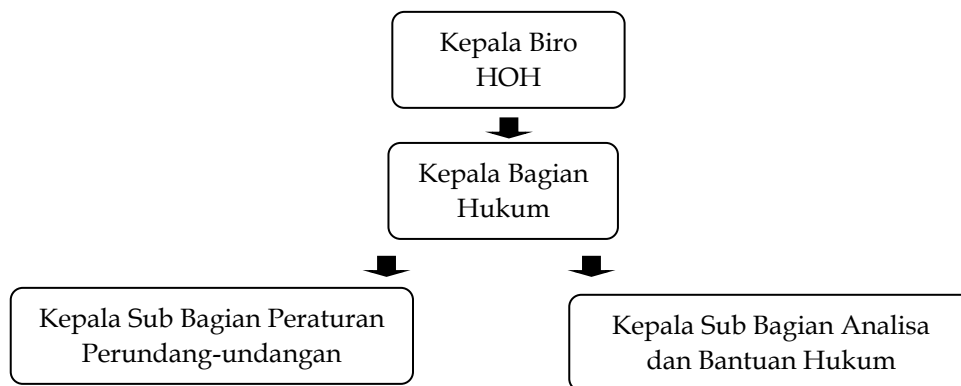
Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan analisa dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan bantuan dan penyuluhan hukum;
- c. pelaksanaan dokumentasi dan pemberian informasi Perundang-undangan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam pengembangan Hukum dan Perundang-undangan di bidang standardisasi.

b. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi (tusi) organisasi yang telah ditetapkan, dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang digambarkan dalam struktur organisasi.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 965/BSN-1/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BSN sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala BSN Nomor 4 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Keputusan Kepala BSN Nomor 965/BSN-1/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BSN, struktur organisasi Bagian Hukum pada Biro HOH BSN sebagai berikut:



B. Sumber Daya Manusia Bagian Hukum Biro HOH BSN

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, sampai dengan 31 Desember 2018 Biro HOH BSN memiliki personel sebanyak 8 orang, dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel B.1 Pegawai Bagian Hukum Biro HOH

No	Unit Kerja	Jumlah Orang
1.	Bagian Hukum	1
2.	Kepala Sub Bagian	2
3.	Perancang Peraturan Perundang-undangan	3
4.	Pengelola Dokumentasi dan Informasi Hukum	2
	Jumlah	8

Tabel B.1 Jenjang Pendidikan SDM Biro HOH

No	Pendidikan	Jumlah Orang
1.	S2	2
2.	S1	6
	Jumlah	8

C. PERAN STRATEGIS BAGIAN HUKUM BIRO HOH BSN

Bagian Hukum pada Biro HOH sebagai unsur penunjang BSN mempunyai peran strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN, di bidang legislasi, kajian hukum, konsultasi, dan bantuan hukum.

I.2 PERMASALAHAN UTAMA

Pada Tahun 2018 Bagian Hukum pada Biro Hukum Organisasi Humas menghadapi tantangan yang cukup besar antara lain:

1. Belum selesainya rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Kebijakan Nasional Standardisasi dan Penilaian

Kesesuaian. Hal tersebut dikarenakan masih diperlukan pembahasan intensif di internal BSN sebelum diusulkan ke Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk ditetapkan.

2. Belum selesainya proses peyusunan seluruh usulan Rancangan Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Skema Penilaian Kesesuaian. Hal tersebut dikarenakan:
 - a. masih diperlukan pembahasan intensif di internal BSN.
 - b. Terdapat perubahan kebijakan berdasarkan Permenkumham Nomor 23 Th 2018 bahwa seluruh peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga wajib dilakukan harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM.
 - c. Pengajuan rancangan Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Skema Penilaian Kesesuaian diajukan pada akhir tahun.
3. Sosialisasi mengenai SPK bagi Kepolisian RI belum terlaksana dengan optimal. Hal tersebut dikarenakan terdapat kendala dalam berkoordinasi dengan Kepolisian RI.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Dalam upaya mencapai sasaran strategis Bagian Hukum pada Biro HOH BSN seperti yang tertera dalam Rencana Strategis periode 2015 - 2019, maka Bagian Hukum pada Biro HOH BSN menetapkan arah kebijakan strategis sebagai acuan langkah-langkah penyusunan target outcome program dan target output kegiatan.

II.2 PENETAPAN KINERJA

Penetapan kinerja merupakan pernyataan kinerja atau perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Penetapan kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk menilai keberhasilan organisasi pada akhir tahun.

Berikut adalah penetapan kinerja Bagian Hukum Biro HOH BSN tahun 2018 berdasarkan sasaran yang telah disempurnakan untuk memenuhi perspektif *stakeholder*:

Tabel II.2 Penetapan Kinerja Bagian Hukum Biro HOH BSN Tahun 2018

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2018
1.	Meningkatkan penyelenggaraan layanan dan bantuan hukum	1. Persentase pemberian bantuan hukum	70%
		2. Jumlah penyuluhan hukum peraturan perundang-undangan bidang SPK	8 Penyuluhan
		3. Persentase peraturan perundang-undangan yang diunggah	80%
		4. Jumlah produk hukum yang ditetapkan oleh Kepala BSN	500 Dokumen
2.	Meningkatkan kesesuaian peraturan perundang di Bidang SPK	5. Jumlah peraturan perundang-undangan di Bidang SPK	8 Peraturan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2018
3.	Meningkatkan harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang SPK	6. Persentase pemenuhan permintaan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ditanggapi	100%
		7. Jumlah kajian hukum	3 kajian hukum
4.	Meningkatkan partisipasi penyusunan regulasi lintas sektoral	8. Jumlah sektor yang ditangani	3 sektor

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Bagian Hukum Biro HOH BSN menetapkan 4 (empat) sasaran yang telah disempurnakan dari sasaran sebelumnya, dimana setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada setiap pelaksanaannya.

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Bagian Hukum Biro HOH BSN telah melaksanakan 2 (dua) program dengan 2 (dua) kegiatan.

Adapun keseluruhan program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

I. Program Pengembangan Standardisasi Nasional, melalui kegiatan Pengembangan Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, dilaksanakan melalui:

Penyusunan penyuluhan hukum, pemrosesan produk hukum dan dokumen Peraturan Pemerintah (PP) di bidang standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yaitu PP tentang standardisasi dan PP tentang penilaian kesesuaian, Peraturan Presiden tentang Badan Standardisasi Nasional, Peraturan Pemerintah tentang Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak.

II. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN, melalui kegiatan:

Peningkatan Pelayanan Hukum, dilaksanakan melalui bantuan hukum, kajian hukum, Pengelolaan Sistem Jaringan dan Dokumentasi Informasi Hukum,

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi serta digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga.

Bagian Hukum pada Biro HOH BSN berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan selama kurun waktu 1 (satu) tahun berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

III.1 Capaian Kinerja

Capaian kinerja bagian hukum dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana telah disampaikan pada Bab II. Pencapaian masing-masing sasaran dan target yang direncanakan dalam Tahun 2018 berdasarkan Penetapan Kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.3 Pencapaian Kinerja Bagian Hukum Biro HOH BSN Tahun 2018

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
I	Internal Process Perspective				
4.	Meningkatkan penyelenggaraan layanan dan bantuan hukum	5. Persentase pemberian bantuan hukum	70%	100%	100%
		6. Jumlah penyuluhan hukum peraturan perundang-undangan di bidang spk	8 penyuluhan	8 penyuluhan	100%

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
I	Internal Process Perspective				
		7. Persentase peraturan perundang-undangan yang diunggah	80%	100%	100%
6.	Meningkatkan kesesuaian peraturan perundangan di bidang SPK	9. Jumlah peraturan perundang-undangan di bidang SPK	8 peraturan	15 peraturan	187,50%
8.	Meningkatkan partisipasi penyusunan regulasi lintas sektoral	12. Jumlah sektor yang ditangani	3 sektor	3 sektor	100%
10.	Meningkatkan harmonisasi peraturan perundangan di bidang SPK	15. Persentase peraturan perundang - undangan yang harmonis di bidang SPK	100%	100%	100%
14	Meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran di Biro HOH	22. Persentase realisasi anggaran	≥ 95%	96,44%	101%

Berdasarkan tabel di atas, berikut diuraikan capaian kinerja untuk masing-masing sasaran dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

TUJUAN :

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai pendukung pelaksanaan pengembangan dan pembinaan standardisasi dan penilaian kesesuaian

Dalam mencapai tujuan tersebut, sasaran yang telah ditetapkan adalah :

1. Meningkatkan penyelenggaraan layanan dan bantuan hukum.
2. Meningkatkan kesesuaian peraturan perundangan di Bidang SPK.
3. Meningkatkan harmonisasi peraturan perundangan di bidang SPK.
4. Meningkatkan partisipasi penyusunan regulasi lintas sektoral.

Pencapaian sasaran diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

SASARAN 4	Meningkatkan penyelenggaraan layanan dan bantuan hukum
--------------------------------	---

Tabel III.4 Capaian Kinerja Sasaran 1

Indikator Kinerja	Capaian 2017	Capaian 2018		
		Target	Realisasi	Capaian
1 Persentase pemberian bantuan hukum	100%	70%	100%	100%
2 Jumlah penyuluhan hukum di bidang SPK	7 kali	8 kali	8 kali	100%
3 Persentase peraturan perundang-undangan yang diunggah	100%	80%	100%	100%

Tahun 2018 pencapaian sasaran meningkatnya penyelenggaraan layanan dan bantuan hukum ada 3 (satu) indikator kinerja yang ditetapkan. Ketiga indikator tersebut mempunyai target capaian yaitu memberikan layanan bantuan hukum terkait permasalahan tugas dan fungsi BSN, memberikan penyuluhan hukum kepada pada *stakeholder* maupun unit kerja di BSN dan mengunggah peraturan BSN dan terkait SPK dalam aplikasi JDIIH BSN.

Untuk layanan bantuan hukum terkait permasalahan tugas dan fungsi BSN yang telah dilaksanakan berupa pemberian konsultasi, penanganan perkara hukum/ pendampingan Pemberi Keterangan Ahli Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian dari BSN baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan perkara di pengadilan negeri.

Untuk layanan bantuan hukum terkait permasalahan tugas dan fungsi BSN yang telah dilaksanakan berupa pemberian konsultasi, penanganan perkara hukum/ pendampingan Pemberi Keterangan Ahli Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian dari BSN baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan perkara di pengadilan negeri.

Untuk penyuluhan hukum di bidang SPK yang telah dilaksanakan berupa penyuluhan sebagai berikut:

No	Jenis Layanan	Tempat	Peserta
1	Sosialisasi Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional	BSN	Pegawai BSN
2	Sosialisasi Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional	BSN	Pegawai BSN
3	Sosialisasi Hukum Administrasi terkait Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara	BSN	Pegawai BSN
4	Sosialisasi Legally Binding	Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur (B2TKS) - (LSPro LUK)	Pegawai LSPro LUK
5	Sosialisasi Penerapan SNI	Provinsi Jawa Timur	Aparat Penegak Hukum
6	Sosialisasi Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia	BSN	Pegawai BSN
7	Sosialisasi Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 5 Tahun 2018 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional	BSN	Pegawai BSN
8	Sosialisasi Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerja Sama Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional	BSN	Pegawai BSN

Untuk kegiatan mengunggah peraturan dalam aplikasi JDIIH BSN, telah dilaksanakan dengan mengunggah seluruh peraturan BSN yang telah diterbitkan dan terkait SPK.

SASARAN 6	Meningkatkan kesesuaian peraturan perundangan di Bidang SPK
----------------------	--

Tabel III.5 Capaian Kinerja Sasaran 2

Indikator Kinerja	Capaian 2017	Capaian 2018		
		Target	Realisasi	Capaian
5. Jumlah peraturan perundang-undangan di Bidang SPK ditetapkan	100%	8 peraturan	15 peraturan	187,50%

Pada tahun 2018, telah dapat dicapai sasaran dengan ditetapkannya 15 (lima belas) peraturan perundang-undangan di Bidang SPK dari target 8 (delapan). Adapun capaian yang dihasilkan antara lain:

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBPN yang berlaku pada BSN;
- c) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional;
- d) Peraturan BSN Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penomoran Standar Nasional Indonesia;
- e) Peraturan BSN Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Adopsi standar dan publikasi internasional menjadi SNI;
- f) Peraturan BSN Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan SNI;
- g) Peraturan BSN Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Komite Teknis;

- h) Peraturan BSN Nomor 5 Tahun 2018 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan BSN;
- i) Peraturan BSN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Kaji Ulang SNI;
- j) Peraturan BSN Nomor 7 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional;
- k) Peraturan BSN Nomor 8 Tahun 2018 tentang Skema sertifikasi produk bakso ikan;
- l) Peraturan BSN Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerja Sama Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional;
- m) Peraturan BSN Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja BSN;
- n) Peraturan BSN Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk; dan
- o) Peraturan BSN Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan BSN Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penomoran Standar Nasional Indonesia.

Sehingga sampai dengan akhir Tahun 2018 pencapaian dari indikator kinerja diatas adalah sebesar 187,50% dari target.

SASARAN 8	Meningkatkan partisipasi penyusunan regulasi lintas sektoral
--------------------------------	---

Tabel III.9 Capaian Kinerja Sasaran 4

Indikator Kinerja	Capaian 2017	Capaian 2018		
		Target	Realisasi	Capaian
8. Jumlah sektor yang ditangani	100%	3 sektor	3 sektor	100%

Pada tahun 2018, 3 (tiga) sektor di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian telah dapat dicapai melalui kegiatan berpartisipasi dalam pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan di bawah koordinasi 3 (tiga) Menteri Koordinator antara lain:

No	Judul Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Instansi Pengusul	Kementerian Koordinator
1	Rancangan Undang-undang tentang Ketenaganukliran	Badan Tenaga Nuklir	Menristekdikti
2	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal	BPJPH	Menko PMK
3	Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan	Kementan	Menko Perekonomian

SASARAN 10	Meningkatkan harmonisasi peraturan perundangan di bidang SPK
-----------------------------	---

Tabel III.6 Capaian Kinerja Sasaran 3

Indikator Kinerja	Capaian 2017	Capaian 2018		
		Target	Realisasi	Capaian
6. Persentase pemenuhan permintaan harmonisasi peraturan perundangan yang ditanggapi	100%	100%	100%	100%
7. Jumlah kajian hukum	3 Kajian	3 Kajian	3 Kajian	100%

Pada tahun 2018, Biro HOH telah memenuhi seluruh permintaan rapat pembahasan rancangan peraturan yang terkait dengan SPK dari Kementerian/Lembaga, yaitu:

No	Judul Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Instansi Pengusul
1	Rancangan Undang-undang tentang Ketenaganukliran	Badan Tenaga Nuklir
2	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal	BPJPH
3	Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan	Kementan

No	Judul Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Instansi Pengusul
4	Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan	DPR RI
5	Rancangan Undang-Undang tentang Metrologi	Kementerian Perdagangan
6	Rancangan Instruksi Presiden tentang Rencana Aksi Perlindungan Konsumen	Kementerian Perdagangan

Untuk kegiatan penyusunan kajian hukum, telah diterbitkan 3 Kajian/analisis hukum terkait Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, sebagai berikut:

1. Analisis dan Evaluasi tentang Pengelolaan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia
2. Analisis Dan Evaluasi tentang Pengelolaan Panitia Teknis Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Penetapan Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) No 09:2007 Pengelolaan *Mirror Committee*
3. Tinjauan Hukum Kekuatan Berlakunya SNI Yang Direvisi Dalam Keputusan Penetapan Sni Yang Tidak Mencantumkan Masa Transisi SNI Revisi.

III.2 Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada Tahun 2018 ini Bagian Hukum pada Biro HOH BSN didukung oleh anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2018. Berdasarkan DIPA Nomor SP DIPA-084.01.1.613104/2018 tanggal 31 Desember 2018, pagu anggaran Bagian Hukum pada Biro HOH BSN sebesar Rp. **1.087.058.000,-** dan realisasi anggaran Bagian Hukum pada Biro HOH BSN Tahun 2018 adalah sebesar Rp. **1.048.387.401,-** atau sebesar **96.44%**.

Pagu dan realisasi anggaran Bagian Hukum pada Biro HOH BSN Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.10 Pagu dan Realisasi Anggaran Biro HOH BSN TA. 2018

Dalam rupiah

No	Uraian	2018		
		Pagu	Realisasi	%
1	Bagian Hukum	1,087,058,000	1,048,387,401	96,44%
	a. Layanan Hukum	169,829,000	168,972,000	

No	Uraian	2018		
		Pagu	Realisasi	%
	b. Pengembangan Sistem SPK	917,229,000	879,415,401	

Perbandingan dengan Tahun 2017

No	Uraian	Realisasi	
		2017	2018
1	Bagian Hukum	1,798.674.626	1,048,387,401
	a. Layanan Hukum	397.738.000	168,972,000
	b. Pengembangan Sistem SPK	1.400.936.626	879,415,401

BAB IV

PENUTUP

Laporan akuntabilitas kinerja Bagian Hukum pada Biro Hukum, Organisasi, dan Humas (HOH) BSN Tahun 2018 menyajikan pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja Bagian Hukum pada Biro HOH Tahun 2018 dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Bagian Hukum pada Biro HOH BSN Tahun 2018, sebagian besar kegiatan telah terlaksana sesuai penetapan kinerja dan indikator kinerja, telah dapat diselesaikan dari target yang ditetapkan. Terlaksananya seluruh kegiatan di Bagian Hukum pada Biro HOH BSN sangat mendukung pelaksanaan kegiatan teknis lingkup Badan Standardisasi Nasional, sesuai tugas fungsi Bagian Hukum pada Biro HOH BSN sebagai fasilitasi dan koordinasi.

Walaupun demikian, masih ditemukan berbagai kelemahan dan sebagian kecil kegiatan yang belum memenuhi target. Hal ini akan dijadikan input untuk perbaikan kegiatan Bagian Hukum pada Biro HOH BSN di tahun-tahun berikutnya.